



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman, Kel. Pasirkaliki, Kec. Cimahi Utara

Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308

Website : bappenda.cimahikota.go.id Email : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI**

NOMOR : 090 / 913 / Bappenda

**TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD)
BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI TAHUN 2024**

**KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH
KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Kepala Perangkat Daerah (Kepala PD) perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) menjadi pedoman unit kerja perangkat daerah di lingkungan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu kiranya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134);
22. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Nomor 199).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA PD) BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI TAHUN 2024.

- KESATU :** Menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 sebagai pedoman unit kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Tahun 2024;
- KEDUA :** Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yang selanjutnya disingkat RENJA PD, merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2024;
- KETIGA :** Isi dan uraian Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal, 17 Juli 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA – PD) BAPPENDA TAHUN 2024



Pemerintah Daerah Kota Cimahi BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3, Jalan Aruman,
Kel. Pasirkaliki, Kec.Cimahi Utara
Telepon (022) 6652559 Fax. (022) 6632308
Website : bappenda.cimahikota.go.id
Email : bappenda@cimahikota.go.id
Cimahi Jawa Barat - 40514

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas izin dan perkenan Nya penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi Tahun 2024 telah tersusun.

Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Penyusunan Renja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi serta merupakan turunan dari Rencana Strategis transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, dengan fokus melakukan kajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap capaian periode Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018-2022.

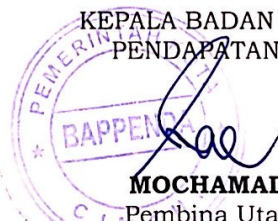
Pada Tahun 2024 Bappenda Kota Cimahi merencanakan 2 Program, 8 Kegiatan, dan 39 Sub Kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp. 13.318.101.253,- (*tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*), untuk pencapaian sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2024.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai instansi pelayanan publik, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati Bappenda Kota Cimahi membuka diri terhadap berbagai masukan ataupun saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Demikian yang dapat kami sajikan, semoga dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan pembangunan di tahun yang akan datang sekaligus informasi bagi seluruh pihak.

Cimahi, Juli 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENDAPATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY

Pembina Utama Muda

NIP. 19691015 199003 1 011

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAH	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bappenda Kota Cimahi	31
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bappenda	40
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Cimahi	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	52
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	52
3.2 Tujuan dan Sasaran	55
3.3 Program dan Kegiatan	57
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	71
BAB V PENUTUP	78

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah S.D Tahun 2022 Kota Cimahi	8
Tabel 2.2. Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal	31
Tabel 2.3. Analisis Desentralisasi Fiskal Kota Cimahi Tahun 2018-2022	32
Tabel 2.4. Komposisi PAD Kota Cimahi Tahun 2022	32
Tabel 2.5. Rata-Rata Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Cimahi Tahun 2018-2022	34
Tabel 2.6. Target dan Realisasi Pajak Daerah Tahun 2018-2026	35
Tabel 2.7. Target dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2018-2022	36
Tabel 2.8. Target Dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2018-2022	37
Tabel 2.9. Target Dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2018-2022	38
Tabel 2.10. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	42
Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024	56
Tabel 3.2. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kota Cimahi	61
Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024	73
Tabel 4.2. Proyeksi Penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Strategi Peningkatan Asli Daerah (PAD)	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rencana kerja memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan rencana tahunan kesatu dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 yang memuat rencana capaian indikator-indikator sebagai ukuran keberhasilan. Pencapaian indikator-indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa indikator lainnya yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebijakan Nasional Provinsi Jawa Barat serta muatan lokal lainnya. Berkaitan dengan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mempunyai tujuan yang harus dicapai yaitu Meningkatkan Desentralisasi Fiskal agar tidak selalu ketergantungan kepada dana transfer dari Pemerintah Pusat. Untuk itu ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenda Kota Cimahi adalah Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah.

Mengingat sangat strategisnya posisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah dalam mewujudkan kemandirian dalam dinamika pembangunan Kota Cimahi yang berkesinambungan, maka Rencana Kerja (RENJA)

Bappenda Kota Cimahi lebih ditekankan kepada peningkatan pendapatan daerah, terutama pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah tersebut dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas kinerja pembangunan Kota Cimahi, karena untuk mewujudkan Visi Kinerja Pembangunan Kota Cimahi tentunya harus bergantung pada realisasi pendapatan daerah yang besar.

Rencana Kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 adalah manifestasi dari dokumen RPD yang termuat di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Cimahi Tahun 2024 dengan Prioritas Kinerja Pembangunan Kota Cimahi terkait Peningkatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik, yang dituangkan ke dalam Renstra Transisi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Renja yang disusun ini perlu disinkronisasi juga, dengan acuan Rencana Kerja Kementerian/ Lembaga, Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Cimahi Tahun 2024.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 berpedoman pada landasan hukum atau aturan-aturan yang berlaku, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPD Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2013 Nomor 160);
20. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287).

21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Nomor 139);
22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 717, Tambahan Berita Daerah Nomor 199);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2024 disusun untuk dijadikan pedoman atau acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal lingkup perangkat daerah maupun tingkat Kota Cimahi dan merupakan penjabaran dari implementasi pelaksanaan Indikator Kinerja di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam menciptakan kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

1.3.1. Maksud

- a. Menjadi pedoman bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi didalam melaksanakan kegiatannya selama 1 (satu) tahun berjalan.
- b. Menjadi alat untuk mengukur kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi;
- c. Menjadi bahan bagi Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam menyusun anggaran belanja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

- a. Mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;

- b. Melaksanakan kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif.
- c. Melakukan pengukuran, evaluasi, pengkajian dan peningkatan kinerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi dari tahun ke tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun 2024, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDATAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Bappenda Tahun lalu, analisis kinerja pelayanan Bappenda, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappenda, Review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menjelaskan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja bappenda, serta program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Bab ini menjelaskan tentang perumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan selama setahun.

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat tentang rencana pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan badan pengelola pendapatan daerah Kota Cimahi yang akan dicapainya pada Tahun 2024.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Maka dari itu rencana kerja Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi tahun sebelumnya harus dilakukan evaluasi. Dimana evaluasi terhadap Renja Bappenda Kota Cimahi Tahun sebelumnya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan rencana program dan kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi tahun sebelumnya ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2020, 2021 dan 2022. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020, 2021, 2022, dan realisasi renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Bappenda dan realisasi APBD.

Berikut rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD s.d Tahun 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TAHUN 2022
KOTA CIMAHI

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 1.2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akuntabilitas PD	BB Predikat	0,00 Predikat	BB Predikat	BB Predikat	100	BB	BB	100
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Umum	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	92 %	92
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi	59 %	0,00 %	54 %	54 %	100	95 %	100 %	170
5.02.0 1.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	33 dok	0 dok	17 dok	17 dok	100	17 dok	34 dok	103
5.02.0 1.2.01 .01	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen anggaran	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
		Jumlah dokumen renja	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen renstra	1 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	200
		Jumlah dokumen renja perubahan	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah forum perangkat daerah	2 keg	0 keg	1 keg	1 keg	100	1 keg	2 keg	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 1.2.01 .07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen LPPD dan LKPJ	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
		Jumlah dokumen SAKIP	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen SKM	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
		Jumlah dokumen Monev kinerja triwulanan	8 dok	0 dok	4 dok	4 dok	100	4 dok	8 dok	100
5.02.0 1.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	24 bulan	0 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	24 bulan	100
5.02.0 1.2.02 .01	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah gaji ASN yang terfasilitasi	28 kali	0 kali	14 kali	14 kali	100	14 kali	28 kali	100
		Jumlah tunjangan ASN yang terfasilitasi	24 kali	0 kali	13 kali	13 kali	100	12 kali	25 kali	104
5.02.0 1.2.02 .07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.0 1.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	4 keg	0 keg	2 keg	1 keg	50	2 keg	3 keg	75
5.02.0 1.2.05 .07	SubKeg pengadaan pakaian dinas beserta atribut perlengkapan nya	Jumlah stel pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	6 stel	0 dok	0 stel	0 stel	-	0 stel	0 stel	0
5.02.0 1.2.05 .11	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bintek	7 peg	0 peg	5 peg	0 peg	-	20 peg	20 peg	286
		Jumlah pegawai yang dibina	70 peg	0 peg	70 peg	70 peg	100	70 peg	70 peg	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan adminitrasi Umum	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .01	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bulan penyediaan komponen instalasi listrik dan penerangan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .02	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor	11 unit	0 unit	11 unit	11 unit	100	10 unit	21 unit	191
		Jumlah bulan penyediaan ATK	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .03	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis/ set peralatan rumah tangga	35 jenis/ set	0 jenis/ set	18 jenis/ set	18 jenis/ set	100	17 jenis/ set	35 jenis/ set	100
5.02.0 1.2.06 .04	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan bahan Logistik kantor	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .05	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan	14 jenis	0 jenis	7 jenis	7 jenis	100	7 jenis	14 jenis	100
		Jumlah bulan penggandaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .06	SubKeg penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan	12 bln	0 bln	0 bln	0 bln	-	0 bln	0 bln	0
		Jumlah buku peraturan	2 buku	0 buku	0 buku	0 buku	-	0 buku	0 buku	0
5.02.0 1.2.06 .08	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman tamu	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.06 .09	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi & Konsultasi SKPD	Jumlah bulan fasilitasi koordinasi dan konsultasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 1.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.07 .09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung/ kantor yang disewa	2 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	2 unit	100
		Jumlah fasilitasi gedung kantor	0 bln	0 bln	0 bln	0 bln	0	12 bln	12 bln	100
5.02.0 1.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemda	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.08 .01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan pelayanan jasa surat menyurat	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.08 .02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan jasa komunikasi	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah bulan jasa listrik	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 1.2.09 .02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemberian BBM	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
		Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang di KIR	1 unit	0 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	1 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	10 unit	0 unit	10 unit	10 unit	100	10 unit	10 unit	100
		Jumlah unit kendaraan yang diservice	10 unit	0 unit	10 unit	6 unit	60	5 unit	10 unit	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 1.2.09 .10	SubKeg Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan peralatan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	24 bln	100
5.02.0 4.2	PROGRAM PENGELOLA AN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah	2,00 %	0,00 %	6,40 %	13,18 %	205,94	-6,52 %	7,78 %	389
		% Realisasi Pajak Daerah	95 %	0 %	90 %	117,74 %	130,82	100 %	115,30 %	121
5.02.0 4.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Data WP Yang Ditetapkan Menjadi SKPD	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	118.580 WP	122.886 WP	106
5.02.0 4.2.01 .01	Sub Keg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pendapatan	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	2 dok	4 dok	100
5.02.0 4.2.01 .02	Sub Keg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen produk hukum	4 dok	0 dok	2 dok	2 dok	100	3 dok	5 dok	125
		Jumlah dokumen standar kebijakan operasional prosedur pajak daerah	2 dok	0 dok	1 dok	1 dok	100	1 dok	2 dok	100
5.02.0 4.2.01 .03	Sub Keg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan sosialisasi pajak daerah	14 keg	0 keg	7 keg	7 keg	100	8 keg	15 keg	107
5.02.0 4.2.01 .04	Sub Keg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah modul sistem yang dikembangkan	4 modul	0 modul	2 modul	2 modul	100	2 modul	3 modul	75
		Jumlah sistem yang dipelihara	3 sistem	0 sistem	3 sistem	3 sistem	100	3 sistem	3 sistem	100
		Jumlah bulan sistem yang diberikan pemeliharaan	24 bln	0 bln	12 bln	12 bln	100	12 bln	23 bln	100

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 4.2.01 .05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data WP yang terdaftar	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	118.580 WP	122.886 WP	91
5.02.0 4.2.01 .06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah WP yang tervalidasi	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	118.580 WP	122.886 WP	91
5.02.0 4.2.01 .07	Sub Keg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah WP yang mendapatkan dokumen penilaian PBB dan BPHTB	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	115.098 WP	116.352 WP	90
5.02.0 4.2.01 .08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah WP yang ditetapkan	135.100 WP	0 WP	135.100 WP	135.100 WP	100	118.580 WP	122.886 WP	91
5.02.0 4.2.01 .09	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak	Persentase permohonan konsultasi yang dilayani	100 %	0 %	0 %	0 %	-	0 %	100 %	100
5.02.0 4.2.01 .10	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah WP yang diverifikasi	129.608 WP	0 WP	129.608 WP	129.608 WP	100	129.608 WP	116.352 WP	91
5.02.0 4.2.01 .11	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah pelaksanaan operasi sisir	12 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	0 kali	12 kali	100
		Jumlah penagihan kepada WP self dan official assesment	2.972 WP	0 WP	1.356 WP	1.356 WP	100	1.616 WP	2.972 WP	100
5.02.0 4.2.01 .12	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	% Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah	100 %	0 %	100 %	100 %	100	100 %	81 %	81

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>output</i>)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Kinerja Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capain Target Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5.02.0 4.2.01 .13	Sub Keg Pengendalian, Pemeriksaan & Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah objek pajak yang dilakukan pemeriksaan / pengawasan	540 obj pjk	0 obj pjk	240 obj pjk	240 obj pjk	100	300 obj pjk	540 obj pjk	100
5.02.0 4.2.01 .14	SubKeg Pembinaan & Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah rekonsiliasi penerimaan pendapatan retribusi daerah	24 kali	0 kali	12 kali	12 kali	100	12 kali	24 kali	100

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dan capaian Renstra Bappenda Kota Cimahi sampai dengan Tahun 2020, dengan hasil pelaksanaannya, sebagai berikut :

- Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 375.687.242.678,91 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 360.955.331.172,96, terrealisasi peningkatannya sebesar 4,08% dari target -8,07%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan **sangat baik**.
- Hasil pengukuran kinerja capaian kinerja program Bappenda Kota Cimahi terdiri dari :
 1. Program perencanaan, pengelolaan anggaran daerah, barang milik daerah, dan perbendaharaan daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya :
 - a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 158.937.237.899 sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 163.136.977.065, dengan terrealisasi peningkatannya sebesar -2,57% dari target yang direncanakan -16,03%, capaian tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka nilai kinerjanya dikatakan sangat baik.

b. Realisasi target pendapatan daerah

Hasil pengukuran kinerja realisasi target pendapatan daerah terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut bahwa realisasi pendapatan daerah tahun berjalan sebesar Rp. 1.457.996.459.899,91 sedangkan target pendapatan daerah sebesar Rp. 1.462.841.536.679,92, dengan persentase capaian sebesar 99,67%, maka nilai kinerjanya dikatakan mempunyai makna baik.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana kantor, mempunyai indikator kinerja persentase sarana dan prasarana yang dipelihara, dengan capaian kinerja sebesar 100%, dilihat berdasarkan dari jumlah jenis sarana dan prasarana yang ada di setiap ruangan kerja yang tertuang dalam kartu inventaris ruangan (KIR), dari 23 ruangan ada sebanyak 217 jenis sarana prasarana yang terinventarisir dan sebanyak 217 jenis sarana dan prasarana dalam kondisi baik, ruangan-ruangan tersebut.
 3. Program peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, mempunyai indikator kinerja Persentase ASN yang dibina, dengan capaian kinerja 100%, dilihat dari jumlah ASN yang telah dilakukan pembinaan sebanyak 71 pegawai.
 4. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu pertama nilai LAKIP Bappenda Kota Cimahi, nilai yang diperoleh pada tahun 2020 sebesar 75,92, Sementara pada tahun 2019 perolehan nilai sebesar 77,06, adanya penurunan, namun masih dengan kategori BB dan interpretasi sangat baik, akuntabel, Berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Selain itu untuk indikator kedua persentase realisasi anggaran, dimana target kinerja yang ditetapkan 95,34% dengan realisasi kinerja 94,44% capaian kinerjanya 99,06%.
- Dari tabel tersebut diatas capaian kinerja sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi pada tahun 2020 terhadap Rencana Strategis (RENSTRA), terkait persentase PAD dari tahun sebelumnya terhadap Rencana

Strategis (RENSTRA) dari target capaian kondisi akhir sebesar 1,95%, sedangkan untuk target capaian kinerja rencana strategis (Renstra) sampai dengan tahun 2020 sebesar -8,07%, terrealisasi pada periode tahun ketiga sebesar 4,08% dengan capaian kinerja terhadap Rencana Strategis (Renstra) 250,56%, capaian tersebut dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik, akibat dari peristiwa Pandemi Covid-19. hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2020 dalam peningkatan PAD.

- Realisasi anggaran belanja langsung sebagai pelaksanaan capaian kinerja Bappenda Kota Cimahi menunjukkan adanya efektifitas penggunaan anggaran yang dibandingkan dengan kinerja di capaian tahun 2020 yaitu, realisasi keuangan sebesar 94,44% bila dibandingkan dengan realisasi kinerja adalah lebih dari 100%, dimana capaian kinerja lebih besar daripada capaian keuangan.
- Pada tahun 2020 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 2.839.823.287,- sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 3.007.001.686,- Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5,56%. Persentase efisiensi ini masih sangat kecil, sehingga dapat diasumsikan bahwa pada tahun 2020 secara umum tidak terdapat efisiensi yang signifikan dari penggunaan sumber daya biaya. Namun bila dilihat pada level kegiatan nampak adanya efisiensi penggunaan sumber daya pada beberapa kegiatan. Seperti pada kegiatan pembinaan dan penyuluhan pajak daerah dan retribusi daerah yang persentase efisiensinya mencapai 17,76%, kegiatan penyediaan jasa komunikasi, listrik dan air yang persentase efisiensinya mencapai 20,13%, kegiatan pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas yang persentase efisiensinya mencapai 14,63%, selain itu pada kegiatan penataan arsip daerah yang persentase efisiensinya mencapai 10,27%.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	21,83%	26,65%	122,08%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja 21,83% terrealisasi sebesar 26,65% dengan capaian kinerja 122,08% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 405.104.991.553,11 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp. 1.520.135.560.503,11 maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 26,65%. Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya, namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya.

- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,74%	7,83%	301,16%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah – audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,74% terrealisasi sebesar 7,83% dengan capaian kinerja 301,16% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 405.104.991.553 sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 375.724.242.678.77, terrealisasi peningkatannya sebesar 7,83% dari target -7,74%, capaian tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2021 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
 - Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
 - Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-3.87%	13,18%	540,57%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	90%	117,74%	130,82%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	53,85%	53,85%	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :

- Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Target kinerja -3,87% terrealisasi sebesar 13,18% dengan capaian kinerja 540,57% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penernagan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 179.891.802.962,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 158.937.237.899,- dengan terrealisasi penurunannya sebesar 13,18% dari target -3,87%, capaian tersebut bukan

merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

- Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 90% terrealisasi sebesar 117,74% dengan capaian kinerja 130,82% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 117,74,% dari target 90%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 130,82%. dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Hotel	219.703.500	283.417.966	129
Restoran	14.278.402.073	17.018.807.906	119,19
Hiburan	88.096.000	123.330.330	140
Reklame	1.748.195.268	2.326.007.100	133,05
Penerangan Jalan	34.709.763.147	37.701.852.705	108.62
Parkir	620.000.000	937.097.932	151,14
Air Tanah	6.360.000.000	8.237.134.116	129,51
BPHTB	42.262.327.061	55.960.840.082	132,41
PBB-P2	52.500.391.242	57.303.314.555	109,15
Jumlah	152.786.878.291	179.891.802.692	117,74

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 128%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

- Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai 76,03% dengan kategori BB, sehingga mempunyai makna baik, bila membandingkan dengan nilai tahun lalu yaitu sebesar

75,92% terdapat kenaikan sebesar 0,11%, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi.

- Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian, Subbag Program dan Keuangan, Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, dan Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah.

- Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 53,85% terrealisasi sebesar 53,85% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 21 orang sedangkan jumlah pegawai

ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2021 berjumlah sebanyak 39 orang dengan realisasi sebesar 53,85% dari target 53,85%, sehingga capaian kinerja sebesar 100%.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2021 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	135.100 WP	135.100 WP	100%	Baik
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	1 Kegiatan	50%	Baik
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2021 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kegiatan sebesar 94%.

Evaluasi pelaksanaan renja Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2022, sebagai berikut :

- Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya dilakukan pengukuran realisasi kinerja dari masing-masing setiap indikator kinerja Bappenda, yang terdiri dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis, selain itu juga dilakukan pengukuran indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi dan analisis pengukuran capaian kinerja tujuan, sebagai berikut :

Tujuan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatkan desentralisasi fiskal	Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	28,46%	29,65%	104,19%	Sangat Baik

Sumber : Laporan Keuangan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Target kinerja 28,46% terrealisasi sebesar 29,65% dengan capaian kinerja 104,19% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam meningkatkan desentralisasi fiskal.

Hasil pengukuran kinerja dalam meningkatkan desentralisasi fiskal terdiri dari realisasi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dari uraian pendapatan daerah tersebut, bahwa realisasi PAD pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 394.676.719.570,53 sedangkan realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.331.038.275.111,53, maka realisasi rasio PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 29,65%.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal di Kota Cimahi masih berada pada kategori **Sedang**, sama dengan tahun sebelumnya,

namun mengalami adanya peningkatan dalam persentase capaiannya sebesar 3%.

Uraian Pendapatan	Target Pendapatan (Rp.)	Realisasi Pendapatan (Rp.)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.318.547.247.193	1.331.038.275.111,53	100,95
Pendapatan Asli Daerah	375.260.580.277	394.676.719.570,53	105,17
Hasil Pajak Daerah	168.162.607.277	193.890.140.403	115,30
Hasil Retribusi Daerah	10.549.195.000	11.294.079.342	107,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.022.613.597	11.022.613.597	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	185.526.164.403	178.469.886.228,53	96,20
Pendapatan Transfer	943.286.666.916	936.361.555.541	99,27

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah - audit BPK).

- Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja tujuan tersebut Bappenda Kota Cimahi mempunyai 1 (satu) sasaran strategisnya yaitu meningkatnya PAD, dimana PAD tersebut harus meningkat dari tahun sebelumnya. Hasil pengukuran capaian kinerjanya sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Meningkatnya PAD	Persentase peningkatan PAD dari tahun sebelumnya	-7,37%	-2,57%	165,13%	Sangat Baik (semakin mengecil angka minusnya maka capaiannya semakin tinggi)

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah - audit BPK).

Target kinerja yang telah ditetapkan -7,37% terrealisasi sebesar -2,57% dengan capaian kinerja 165,13% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Hasil pengukuran kinerja meningkatnya pendapatan asli daerah terdiri dari realisasi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, ke 4 (empat) komponen tersebut terdapat 3 (tiga) realisasi penerimaan pendapatan asli daerahnya melampaui dari target yang telah ditetapkan atau tercapai sesuai targetnya. Dari uraian pendapatan asli daerah tersebut bahwa jumlah realisasi PAD tahun berjalan adalah sebesar Rp. 394.676.719.570,53

sedangkan jumlah realisasi PAD tahun sebelumnya sebesar Rp. 405.104.991.553,11, terdapat penurunan PAD sebesar -2,57%, namun apabila terhadap target capaian kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 yaitu menetapkan penurunannya sebesar -7,37%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 165,13%, hal tersebut bukan merupakan kinerja yang buruk, dikarenakan pengukurannya dapat dilihat bilamana semakin mengecil angka minusnya maka capaian kinerjanya dikatakan sangat baik.

- Selain pengukuran kinerja tujuan dan sasaran strategis tersebut Bappenda Kota Cimahi menetapkan juga program-program yang dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai alat pencapaiannya, diantaranya :
 1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya
 - Persentase realisasi pajak daerah
 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja :
 - Nilai akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi
 - Persentase unit kerja yang mendapatkan layanan administrasi umum
 - Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi

Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya	-6.52%	7,78%	319,33%	Sangat Baik
	Persentase realisasi pajak daerah	100%	115,30%	115,30%	Sangat Baik
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Bappenda Kota Cimahi	BB	BB	100%	Baik
	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100%	100%	100%	Baik
	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	94,59%	100%	105,71%	Sangat Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah mempunyai 2 (dua) indikator kinerja diantaranya :

a. Persentase peningkatan pajak daerah setiap tahunnya

Target kinerja -6,52% terrealisasi sebesar 7,78% dengan capaian kinerja 319,33% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja peningkatan pajak daerah setiap tahunnya terdiri dari realisasi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, serta bumi dan bangunan perkotaan. Dari uraian hasil pajak daerah tersebut bahwa realisasi hasil pajak daerah tahun berjalan sebesar Rp. 193.890.140.403,- sedangkan realisasi hasil pajak daerah tahun sebelumnya sebesar Rp. 179.891.802.692,- sehingga terdapat peningkatannya sebesar 7,78% dari tahun sebelumnya, atau dari target -6,52%, capaian kinerjanya sebesar 319,33%, hal tersebut suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan penerimaan hasil pajak daerah.

b. Persentase Realisasi Pajak Daerah

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 115,30% dengan capaian kinerja 115,30% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan penerimaan hasil pajak daerah.

Hasil pengukuran kinerja persentase realisasi pajak daerah bersumber dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, BPHTB dan PBB-P2, dengan realisasi kinerja sebesar 115,30,% dari target 100%, sehingga capaian kinerjanya sebesar 115,30%, dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian Kinerja (%)
1	Hotel	261.727.322	300.018.582	114,63
2	Restoran	20.400.257.563	23.132.936.631	113,40
3	Hiburan	383.600.000	461.850.519	120,40
4	Reklame	2.084.000.001	2.988.440.000	143,40
5	Penerangan Jalan	39.494.600.000	41.170.519.697	104,24
6	Parkir	900.000.000	1.128.146.604	125,35
7	Air Tanah	13.138.422.391	15.724.487.391	119,68
8	BPHTB	38.500.000.000	51.047.178.518	132,59
9	PBB-P2	53.000.000.000	57.936.562.461	109,31
Jumlah		168.162.607.277	193.890.140.403	115,30

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Rata-rata persentase capaian realisasi penerimaan hasil pajak daerah dari 9 (Sembilan) jenis pajak daerah sebesar 120,33%.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Target kinerja BB sementara nilai SAKIP Bappenda atau hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dengan capaian kinerja 100% atau mendapatkan nilai BB atau 76,03 yang dapat dikategorikan sangat baik, nilai akuntabilitas tersebut berdasarkan laporan hasil evaluasi oleh inspektorat Kota, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja Bappenda.

b. Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum.

Target kinerja 100% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% atau mempunyai makna **Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum.

Hasil pengukuran kinerja persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum dilihat dari Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi, jumlah unit kerja Bappenda Kota Cimahi sebanyak 10 unit terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Penerimaan dan Pengendalian Pendapatan, Bidang Identifikasi Pendapatan, Subbag Umum & Kepegawaian,

Subbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Subbid Perencanaan Pendapatan dan Sistem informasi Pajak Daerah, Subbid Penerimaan, Penagihan dan Keberatan, Subbid Pengawasan, Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional.

3. Jumlah ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi.

Target kinerja 94,59% terrealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 105,71% atau mempunyai makna **Sangat Baik**, hal tersebut merupakan suatu prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 dalam peningkatan kapasitas pegawai ASN di Bappenda Kota Cimahi.

Hasil pengukuran kinerja persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi dilihat dari jumlah pegawai ASN yang telah melaksanakan bimtek, workshop, diklat, dan pelatihan lainnya yang memiliki ijazah atau sertifikat berjumlah sebanyak 36 orang sedangkan jumlah pegawai ASN Bappenda Kota Cimahi posisi bulan desember Tahun 2022 berjumlah sebanyak 36 orang, target capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 36 orang.

- Selain pengukuran-pengukuran kinerja tersebut diatas, pelaksanaan kegiatan Bappenda Kota Cimahi pada Tahun 2022 juga perlu dilakukan pengukuran capaian kinerjanya, yaitu :

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
1.	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	118.580 WP	122.886 WP	103,63%	Sangat Baik
2.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	17 dokumen	17 dokumen	100%	Baik
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

N o	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Makna
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	Baik
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitas gedung/ kantor yang diadakan	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik
8.	Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	12 Bulan	100%	Baik

Sumber : Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah)

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas, terdapat 8 (delapan) kegiatan, terdapat 8 (delapan) indikator kinerja kegiatan, dimana dari keseluruhan capaian kinerja mempunyai rata-rata makna **Baik**. Dengan rata-rata persentase capaian kinerja kegiatan sebesar 100,45%.

Hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu, yaitu pada tahun 2020, 2021, sampai dengan tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa setiap target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat terrealisasi dengan sangat baik/baik, hal tersebut merupakan prestasi bagi Bappenda Kota Cimahi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara terencana, terarah, efisien, dan efektif serta dapat mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen perencanaan strategis Bappenda Kota Cimahi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Bappenda Kota Cimahi merupakan Perangkat Daerah yang belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, sehingga Bappenda Kota Cimahi cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan yang dibuat oleh Bappenda Kota Cimahi.

2.2.1. Analisis Prosentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah

Prosentase PAD terhadap pendapatan daerah untuk menunjukkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kriteria penilaian tingkat desentralisasi fiskal dapat dikategorikan seperti tabel berikut ini :

TABEL 2.2
KRITERIA PENILAIAN TINGKAT DESENTRALISASI FISKAL

Persentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Sedang
30,01 – 40,00	Cukup
40,01 – 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010:78)

Rumusan rasio desentralisasi fiskal yaitu :

ddf :
$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

TABEL 2.3
ANALISIS DESENTRALISASI FISKAL KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 – 2022

Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi PAD	Rasio PAD Terhadap Pendapatan	Tingkat Kemandirian Daerah
2018	1,316,230,476,122,39	335,016,530,127,39	25.45%	Sedang
2019	1.433.371.386.973,96	360.955.331.172,96	25.18%	Sedang
2020	1.457.996.459.899,91	375.687.242.678,91	25.77%	Sedang
2021	1.520.135.560.503,11	405.104.991.553,11	26.65%	Sedang
2022	1.331.038.275.111,53	394.676.719.570,53	29.65%	Sedang

Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

Berdasarkan hasil analisis diatas maka secara umum indikator kinerja sasaran Bappenda Kota Cimahi dalam meningkatkan desentralisasasi fiskal di Kota Cimahi pada tahun 2018-2022 masih berada pada kategori posisi sedang.

TABEL 2.4
KOMPOSISI PAD KOTA CIMAHI
TAHUN 2022

NO	KOMPONEN PAD	REALISASI (Rp.)	% TERHADAP PAD
1	Hasil Pajak Daerah	193.890.140.403,00	49,13
2	Hasil Retribusi Daerah	11.294.079.342,00	2,86
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	178.469.886.228,53	45,22
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.022.613.597,00	2,79
JUMLAH PAD		394.676.719.570,53	100,00

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2022 (diolah – audit BPK).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penyumbang terbesar dari PAD berasal dari komponen Hasil Pajak Daerah sebesar 49,13%, kemudian dari komponen Lain-lain PAD yang sah, yang didalamnya merupakan pendapatan dari BLUD, yaitu sebesar 45,22%, kemudian

retribusi daerah 2,86%, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,79%.

2.2.2. Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2018 - 2022

Capaian persentase pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh Bappenda Kota Cimahi dari Tahun 2018 - 2022, setiap tahunnya melampaui dari target PAD yang telah ditetapkan, rata-rata persentase capaian sebesar 107,94%. Penyumbang PAD terbesar dilihat berdasarkan persentase rata-rata realisasi terhadap target dari setiap tahunnya berasal dari komponen pajak daerah sebesar 110,49%, Lain-lain PAD yang sah sebesar 106,47%, kemudian retribusi daerah sebesar 103,09% dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 100,82%.

Tabel penyajian rata-rata pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2018 - 2022, sebagai berikut :

TABEL 2.5
RATA-RATA CAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA CIMAHI
TAHUN 2018 - 2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	168.162.607.277	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	193.890.140.403	102	101	116	118	115	110
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	10.549.195.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	11.294.079.342	94	109	103	101	107	103
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	11.022.613.597	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	11.022.613.597	100	100	104	100	100	101
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	185.526.164.403	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	178.469.886.228	104	102	112	118	96	106
JUMLAH	326.842.694.184	354.211.073.635	331.843.741.664	346.622.143.134	375.260.580.277	335.016.530.127	360.955.331.173	375.687.242.679	405.104.991.553	394.676.719.570	103	102	113	117	117	108

Sumber : Laporan Keuangan Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.3. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pajak Daerah

Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi mengalami pertumbuhan positif dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pajak daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 110%, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 115% dari target sebesar Rp. 168.162.607.277,- dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.6
TARGET DAN REALISASI PAJAK DAERAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp,)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata- rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Pajak Daerah	132.108.046.124	161.488.910.896	136.545.238.041	152.786.878.291	168.162.607.277	134.770.330.583	163.136.977.065	158.937.237.899	179.891.802.962	193.890.140.403	102	101	116	118	115	110

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.4. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Retribusi Daerah

Hasil retribusi daerah merupakan komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola oleh perangkat daerah penghasil, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil retribusi daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 103%, sedangkan capaian realisasi dari hasil retribusi daerah pada tahun 2022 sebesar 109% dari target sebesar Rp. 10.549.195.000,- hal tersebut merupakan pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.7
TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI DAERAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Retribusi Daerah	13.042.067.600	14.585.901.971	14.825.308.329	11.404.826.000	10.549.195.000	12.220.530.827	15.832.320.921	15.243.650.522	11.548.482.640	11.294.079.342	94	109	103	101	107	103

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.5. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD yaitu lembaga keuangan Bank oleh Bank Jabar, dimana rata-rata realisasi capaian dari hasil pengelolaan kekayaan daerah pada tahun 2018-2022 sebesar 101 %, sedangkan capaian realisasi dari hasil pajak daerah pada tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar Rp. 11.022.613.597, pendapatan ini mempunyai pertumbuhan yang tetap dan masih dalam pertumbuhan positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.8
TARGET DAN REALISASI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH
YANG DIPISAHKAN
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000	9.297.600.000	9.391.200.000	9.956.960.000	11.022.613.597	9.391.200.000	9.297.600.000	9.778.080.000	9.956.960.000	11.022.613.597	100	100	104	100	100	101

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.6. Analisis Pertumbuhan PAD dari Hasil Lain-lain PAD yang Sah

Hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagai komponen pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi jasa usaha, pendapatan dari pengembalian, pendapatan dari badan layanan umum daerah (BLUD), sumbangan pihak ketiga, dana kapitasi JKN pada FKTP, dan dana non kapitasi.

Rata-rata realisasi capaian dari hasil lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tahun 2018-2022 sebesar 106%, sedangkan capaian realisasi pada tahun 2022 sebesar 96% dari target sebesar Rp. 185.526.164.403,- pendapatan tersebut adanya pertumbuhan yang positif, dengan rincian per tahun sebagai berikut :

TABEL 2.9
TARGET DAN REALISASI LAIN-LAIN PAD YANG SAH
TAHUN 2018-2022

Komponen PAD	Target (Rp.)					Realisasi (Rp.)					% Capaian					% Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	
Lain-lain PAD yang sah	172.301.380.460	168.838.660.768	171.081.995.294	172.473.478.843	185.526.164.403	178.634.468.717	172.688.433.187	191.728.274.258	203.707.746.221	178.469.886.229	104	102	112	118	96	106

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappenda Kota Cimahi Tahun 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022 (diolah – audit BPK)

2.2.7. Faktor Yang Mendorong Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah

Faktor-faktor yang mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Peningkatan pelayanan wajib pajak melalui pembayaran pajak daerah secara online yang mendorong kepatuhan dan kepercayaan wajib pajak melalui kerjasama dengan lembaga perbankan, PT. Pos Indonesia dan e-commerce.
2. Peningkatan intensifikasi dan / atau ekstensifikasi dalam penggalan potensi dan penerimaan daerah.
3. Kebijakan-kebijakan pajak daerah yang diterapkan.

2.2.8. Faktor Yang Menghambat Peningkatan Pajak Daerah.

Faktor-faktor yang menghambat peningkatan penerimaan pajak daerah diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional profesional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru Sita dan lainnya.
2. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.
3. Data potensi yang masih belum akurat.

4. Adanya WP yang tidak patuh membayar pajak.
5. Masih lemahnya koordinasi / sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
6. Sarana dan prasarana yang sudah tidak sesuai kebutuhan/ belum memadai.

2.2.9. Strategi Peningkatan PAD

Strategi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) terdiri dari :

1. Pendekatan Teknis, yaitu :
 - a. Ekstensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan cara menggali/mencari potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru.
 - b. Intensifikasi PAD, yaitu : meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan potensi sumber PAD yang sudah ada.
2. Pendekatan Yuridis, yaitu meningkatkan PAD melalui pembuatan/ penyusunan atau penyempurnaan regulasi.

GAMBAR 2.1
STRATEGI PENINGKATAN ASLI DAERAH (PAD)



2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda Kota Cimahi masih terdapat kendala diantaranya :

1. Belum adanya SDM tenaga fungsional professional seperti Penyuluh Pajak, Penilai PBB, Juru sita dan lainnya.
2. Data potensi belum akurat.
3. Masih terdapat WP yang tidak patuh membayar pajak.
4. Masih lemahnya koordinasi / sinergis dengan Perangkat Daerah terkait.
5. Belum optimalnya elektronifikasi transaksi pemerintah daerah secara lebih luas.
6. Tidak adanya sumber daya alam yang potensial.

Hal ini tentu berdampak pada tidak terlaksananya penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah secara maksimal. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala tersebut, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi terus melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumber daya aparatur melalui pelatihan-pelatihan teknis pengelolaan pajak daerah serta diklat-diklat lainnya yang berkaitan dengan tupoksi.
2. Melakukan pemuktahiran data potensi.
3. Melakukan pengembangan digitalisasi kesisteman.
4. Meningkatkan koordinasi yang sinergis dengan instansi maupun aparat terkait.
5. Melakukan sosialisasi lebih intensif kepada masyarakat tentang segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah.
6. Penerapan sanksi hukum secara tegas sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD KOTA CIMAHI

Rancangan awal RKPD tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja PD tahun 2024. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan Badan Pengelola Pendapatan Daerah. Proses penganggaran dan Musrenbang yang dilakukan dengan membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dapat diterima dan akan digunakan secara efektif untuk melaksanakan kegiatan dalam 1 tahun anggaran untuk mencapai target secara optimal. Alasan proses RKPD dan hasil analisis kebutuhan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menghindari kelebihan anggaran serta optimalisasi kegiatan yang dilaksanakan, serta mengevaluasi kelogisan anggaran dengan indikator kinerja. Penjelasan temuan-temuan setelah proses rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan RKPD yaitu adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung prioritas pembangunan kota cimahi dalam peningkatan intensifikasi dan / atau extensifikasi penerimaan daerah yang tidak terdapat di RKPD dan belum dianggarkan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

TABEL 2.10
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
A	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	3%	2.839.107.115	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		% Peningkatan target pajak daerah	3%	3.569.107.115	
			% Realisasi pajak daerah	100%				% Realisasi pajak daerah	100%		
I	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	115.615 WP	2.839.107.115	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD	115.615 WP	3.569.107.115	
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	70.999.814	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen	70.999.814	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	148.655.500	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen	148.655.500	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	130.000.000	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak daerah	4 Laporan	190.000.000	Penyuluhan pajak daerah di setiap RW atau kelurahan

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	2 Unit	416.594.562	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak daerah	2 Unit	786.594.562	Kerja sama terkait pemetaan bidang pertanahan dan Integrasi sistem dengan provinsi terkait opsen PKB dan BBNKB
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	343.718.992	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	3 Laporan	523.718.992	Pendataan / Penilaian individu PBB untuk perumahan - perumahan / rumah toko yang belum memiliki SPPT
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan	61.909.964	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	3 Laporan	61.909.964	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Objek Pajak	95.999.678	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB)	Kota Cimahi	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	50 Objek Pajak	95.999.678	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	118.098 Dokumen	735.460.250	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	118.098 Dokumen	735.460.250	
9	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	118.098 Dokumen	173.949.806	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak	Kota Cimahi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	118.098 Dokumen	173.949.806	
10	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	190.246.649	Penagihan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1200 Dokumen	265.246.649	Kerja sama penagihan piutang Pajak Daerah dengan Kejaksaan Negeri Cimahi dan Penyampaian surat tagihan pajak terutang melalui jasa kurir/pos

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
11	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	106.821.000	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	300 Dokumen	106.821.000	
12	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500 Dokumen	216.670.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	500 Dokumen	246.670.000	Pemasangan media peringatan reklame
13	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	73.426.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	88.426.400	Rekonsiliasi data piutang pajak daerah
14	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	74.654.500	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Dokumen	74.654.500	
B	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 (BB) Nilai	8.983.262.001	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 (BB) Nilai	9.748.994.138	
			Indeks Profesionalitas ASN	64,10 Nilai				Indeks Profesionalitas ASN	64,10 Nilai		
			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76 Nilai				Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	76 Nilai		
II	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	124.147.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	15 Dokumen	124.147.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
15	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	53.647.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	53.647.000	
16	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.950.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.950.000	
17	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
18	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	2.750.000	
19	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.450.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
20	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	8.850.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 laporan	8.850.000	
21	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	51.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	51.000.000	
III	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	7.927.384.001	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	7.927.383.138	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	7.879.614.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/ Bulan	7.879.613.138	Penyesuaian pembulatan gaji
23	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	46.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	46.200.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
24	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1.570.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	1 Laporan	1.570.000	
IV	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Keg	69.540.000	Kegiatan Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian	2 Keg	69.457.000	
25	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	19.350.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	70 Orang	19.333.000	Penyesuaian hasil asistensi
26	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50.190.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Cimahi	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang	50.124.000	Penyesuaian hasil asistensi
V	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	352.337.000	Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah bulan penyediaan administrasi umum	12 Bulan	341.832.900	
27	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.422.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.532.000	Penyesuaian hasil asistensi

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
28	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	80.760.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	73.466.900	Penyesuaian hasil asistensi
29	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	7.869.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Cimahi	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	8.091.000	Penyesuaian hasil asistensi
30	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	82.250.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Cimahi	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	82.644.800	Penyesuaian hasil asistensi
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	61.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Cimahi	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	58.862.200	Penyesuaian hasil asistensi
32	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	3.700.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Laporan	3.700.000	
33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	113.536.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	113.536.000	
VI	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	111.575.000	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang diadakan	12 Bulan	888.382.100	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
34	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit	39.700.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	17 Unit	816.507.100	Pengadaan kendaraan operasional lapangan, POD Cast, dan Alat pengukur reklame
35	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	71.875.000	Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Kota Cimahi	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	71.875.000	
VII	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	120.925.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah	12 Bulan	119.875.000	
36	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	90.515.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	90.515.000	Penyesuaian hasil asistensi
37	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	30.410.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Cimahi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.360.000	Penyesuaian hasil asistensi
VIII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	277.354.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara	12 Bulan	277.917.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2024					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	195.600.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak & Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Cimahi	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	200.270.000	Penyesuaian hasil asistensi
39	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	50 Unit	81.754.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Cimahi	Jumlah unit kendaraan yang dibayarkan pajak	68 Unit	77.647.000	Penyesuaian hasil asistensi

Sumber : Bappenda Kota Cimahi

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

Visi dan Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN Tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, sebagai berikut :



Visi dan misi pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri dapat terwujud jika didukung pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik agar kemandirian dalam segi pembiayaan pembangunan dapat terwujud. Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda dalam pengelolaan keuangan dan

pendapatan daerah. Pengelolaan keuangan dan pendapatan yang baik akan mendukung dalam menciptakan kemandirian Pemerintah Daerah, yang merupakan cikal bakal dalam mewujudkan Indonesia yang mandiri.

Agenda pembangunan nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi tujuan yang harus dicapai dalam perencanaan strategis Bappenda. Hal ini tercantum dalam Rancangan Renstra Transisi Bappenda Kota Cimahi Tahun 2023-2026. Secara tidak langsung tugas pokok dan fungsi Bappenda sangat berkaitan dengan agenda ini.

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan cara mengevaluasi permasalahan pembangunan daerah, dihubungkan dengan program pembangunan daerah sebagaimana termuat pada draf Review RPJMD pada tahun rencana.

Program prioritas adalah program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian prioritas pembangunan daerah dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar serta syarat layanan minimal. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan hasil identifikasi permasalahan yang dihadapi.

Bappenda Kota Cimahi sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kota Cimahi memiliki peran yang strategis dalam pendanaan pembangunan di daerah Kota Cimahi. Kelancaran pembangunan Kota Cimahi akan sangat bergantung pada keberhasilan Bappenda Kota Cimahi dalam mengelola pendapatan daerah.

Isu strategis Bappenda Kota Cimahi akan diselaraskan dengan isu strategis dalam RPJMN dan RPD, dimana isu strategis keterkaitan dengan Bappenda Kota Cimahi mengenai kualitas pembangunan ekonomi. Isu-isu strategis yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ada di Kota Cimahi Tahun 2024, adalah :

1. Kemiskinan
2. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia
3. Kualitas pembangunan ekonomi
4. Tata kelola pemerintahan
5. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

Untuk mewujudkan tujuan, sasaran pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2024, ditetapkan 16 (enam belas) prioritas pembangunan daerah, sebagai berikut:

1. Penguatan kualitas pelayanan kesehatan
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas perlindungan dan pelayanan sosial
4. Peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan pemberdayaan masyarakat berbasis gender
5. Peningkatan sumber daya olahraga, daya saing pemuda dan pelaku budaya
6. Peningkatan kapasitas dalam penanggulangan bencana
7. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim
8. Peningkatan iklim investasi
9. Peningkatan daya beli masyarakat
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha ekonomi dan produk lokal
11. Menjaga ketahanan pangan daerah
12. Penyerapan tenaga kerja
13. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas kawasan strategis kota
14. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perumahan, dan kawasan permukiman
15. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik
16. Fasilitasi pemilihan umum serentak

Tema pembangunan Kota Cimahi pada Tahun 2024 adalah Pemantapan Stabilitas Perekonomian dan peningkatan daya saing sumber daya manusia. sedangkan dari 16 prioritas pembangunan Kota Cimahi, keterkaitan Bappenda Kota Cimahi berada dalam peningkatan iklim investasi serta penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA BAPPENDA KOTA CIMAHI

Keterkaitan dan terjalinnya sinergitas antara Pembangunan Pusat dan Daerah harus tercipta dengan baik, karena pada hakekatnya baik Pusat maupun Daerah memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan masyarakat madani yang sejahtera serta mandiri.

Daerah sebagai ujung tombak dalam mewujudkan cita-cita nasional tersebut tentunya memiliki visi dan misi pembangunan termasuk Kota Cimahi, dan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cimahi Tahun 2023-2026, juga untuk mendorong agar kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan tetap mengarah kepada pencapaian Visi dan Misi Kota serta target yang telah ditetapkan.

VISI : Cimahi Kota Cerdas

MISI : 1. Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

3. Meningkatkan Perekonomian yang Berdaya Saing serta Berbasis Inovasi Daerah

4. Mewujudkan Keserasian Pembangunan yang Berkeadilan

5. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Fungsi Bappenda Kota Cimahi sebagai *leading sector* pengelola Pendapatan Daerah mempunyai peran yang vital dalam upaya mewujudkan visi dan misi Wali Kota Cimahi terpilih. Pendanaan program dan kegiatan Prioritas Kepala Daerah akan bergantung pada kinerja Bappenda dalam pengelolaan pendapatan daerah. Dimana hal tersebut sangat berperan penting demi keberlangsungan pertumbuhan dan mobilitas pembangunan Kota Cimahi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya, serta tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Bappenda Kota Cimahi maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2023-2026 yang menjadi tugas Bappenda Kota

Cimahi dalam penyelenggaraan sebagian urusan keuangan daerah di bidang pemungutan pajak daerah dan pendapatan asli daerah serta memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan urusan keuangan daerah, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappenda Kota Cimahi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026, adalah :

- 1. Tujuan Jangka Menengah
 - Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi
 - Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan
- 2. Sasaran Jangka Menengah
 - Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah
 - Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Dibawah ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan, sasaran, Indikator sasaran beserta target kinerja sasarnya. Rumusan tersebut disajikan sedemikian rupa dengan memperhitungkan resiko maupun anomali yang mungkin saja terjadi. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah beserta indikator kinerjanya, dalam tabel sebagaimana berikut ini :

TABEL 3.1
TUJUAN & SASARAN JANGKA MENENGAH YANG MENGACU PADA RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH (RPD)

Tujuan	Sasaran	Indikator	Tujuan/ Sasaran
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5,11 – 5,95%
	Mempercepat Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Optimalisasi Potensi Daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	29,22%
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	60,75 (B) Indeks
	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappenda	30 Nilai

Sumber : Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kerja menjadi komponen penting bagi organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Di dalam sebuah organisasi perusahaan atau lainnya, terdapat program kerja yang dimana program ini telah disusun sedemikian rupa untuk dilaksanakan. Yang sehingga dapat membantu organisasi untuk mencapai sebuah tujuan utama. Dengan adanya program kerja maka setiap anggota atau tim yang melakukan pekerjaan dapat bekerja secara lebih efektif dan terstruktur.

Dalam hal ini yang dimaksud program kerja adalah susunan rencana kerja yang sudah dirancang dan telah disepakati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara terarah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan. Dan selain itu program kerja sendiri juga dapat menjadi sebuah tolak ukur dalam pencapaian target saat akan melakukan pekerjaan.

Rencana kerja Bappenda Kota Cimahi disusun dengan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang tercantum dalam RPD dan Renstra. Hal tersebut dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang selaras dengan Visi dan Misi Perangkat Daerah, Bappenda Kota Cimahi telah menyusun beberapa Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024, yaitu :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

- I. Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah
 - 1. Sub Kegiatan : Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
 - 2. Sub Kegiatan : Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.
 - 3. Sub Kegiatan : Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
 - 4. Sub Kegiatan : Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah

5. Sub Kegiatan : Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
6. Sub Kegiatan : Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
7. Sub Kegiatan : Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
8. Sub Kegiatan : Penetapan Wajib Pajak Daerah
9. Sub Kegiatan : Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah
10. Sub Kegiatan : Penagihan Pajak Daerah
11. Sub Kegiatan : Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
12. Sub Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
13. Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
14. Sub Kegiatan : Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

2 Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

- II. Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 15.Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 16.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 17.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 18.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 19.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD

- 20.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 21.Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- III. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 22.Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 23.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - 24.Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Semesteran SKPD
- IV. Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 25.Sub Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 26.Sub Kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- V. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 27.Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 28.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 29.Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 30.Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 31.Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 32.Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 33.Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- VI. Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 34.Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya
 - 35.Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- VII. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
- 36.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 37.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- VIII. Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 38.Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 39.Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya

TABEL 3.2
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA CIMAHI

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah		3,00%	3.569.107.115			3,00%	3.852.536.000
					% Realisasi Pajak Daerah		100,00%				100,00%	
	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD		115.615 WP	3.569.107.155			117.927 WP	3.852.536.000
		0001		SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	2 dok	70.999.814	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 dok	76.500.000
		0002		SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Kota Cimahi	1 dok	148.655.500	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1 dok	272.530.000
		0003		SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kota Cimahi	4 lap	190.000.000	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		4 lap	175.450.000
		0004		SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	2 unit	786.594.562	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 unit	589.256.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			000 5	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Kota Cimahi	3 lap	523.718.992	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 lap	350.000.000
			000 6	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kota Cimahi	3 lap	61.909.964	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		3 lap	61.000.000
			000 7	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kota Cimahi	50 objek pajak	95.999.678	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		165 objek pajak	106.000.000
			000 8	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Kota Cimahi	118.098 dok	735.460.250	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		117.927 dok	840.000.000
			000 9	SubKeg Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	-	-	-			575 layanan	50.000.000
			001 0	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Cimahi	118.098 dok	173.949.806	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		124.381 dok	183.000.000
			001 1	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kota Cimahi	1.200 dok	265.246.649	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		1.250 dok	235.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			001 2	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Kota Cimahi	300 dok	106.821.000	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		350 dok	167.800.000
			001 3	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kota Cimahi	500 dok	246.670.000	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		500 dok	275.000.000
			001 4	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kota Cimahi	12 dok	88.426.400	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		12 dok	122.000.000
			001 5	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Kota Cimahi	2 lap	74.654.500	PAD (Dana Umum) Pendapatan Asli Daerah (PAD)		2 lap	349.000.000
0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73 (BB) Nilai	9.748.994.138			75 (BB) Nilai	10.526.647.000
					Indeks Profesionalitas ASN		64,10 Nilai				76,92 Nilai	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76 Nilai				77 Nilai	
	2	0 1		Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, pengangan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		15 dok / lap	124.147.000			15 dok/ lap	125.680.000
			000 1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2 dok	53.647.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 dok	55.271.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			000 2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.950.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	3.034.000
			000 3	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.500.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	2.760.000
			000 4	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.750.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	5.642.000
			000 5	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.450.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 dok	2.685.000
			000 6	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Cimahi	4 lap	8.850.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		4 lap	11.057.000
			000 7	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	5 lap	51.000.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 lap	45.231.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
	2	0		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah		12 bln	7.927.383.138			12 bln	8.866.354.000
			0001	SubKeg Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Cimahi	36 orang	7.879.613.138	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum		40 orang	8.820.094.000
			0005	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Cimahi	1 lap	46.200.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 lap	44.657.000
			0007	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kota Cimahi	1 lap	1.570.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 lap	1.603.000
	2	0		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		2 keg	69.457.000			2 keg	204.690.000
			0010	SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	70 orang	19.333.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		70 orang	60.000.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			001 1	SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan	Kota Cimahi	8 orang	50.124.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		10 orang	144.690.000
	2	0 6		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bln	341.832.900			12 bln	458.086.000
			000 1	SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	1.532.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 paket	2.396.000
			000 2	SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	73.466.900	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 paket	77.596.000
			000 3	SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Cimahi	3 paket	8.091.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 paket	45.000.000
			000 4	SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	82.644.800	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 paket	61.831.000
			000 5	SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	58.862.200	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		2 paket	61.831.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			000 8	SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Cimahi	5 lap	3.700.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 lap	15.000.000
			000 9	SubKeg Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	70 lap	113.536.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		100 lap	175.000.000
	2	0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan		12 bln	888.382.100			12 bulan	350.930.000
			000 6	SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	17 unit	816.507.100	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 unit	250.930.000
			000 9	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	1 unit	71.875.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		1 unit	100.000.000
	2	0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bln	119.875.000			12 bln	169.377.000
			000 1	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Cimahi	4 lap	90.515.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		5 lap	138.677.000

Kode				Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
			000 2	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Cimahi	12 lap	29.360.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		12 lap	30.700.000
	2	0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara		12 bln	277.917.000			12 bln	351.530.000
			000 2	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Cimahi	10 kend	200.270.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		10 kend	262.3000.000
			000 6	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Cimahi	68 unit	77.647.000	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		50 unit	89.230.000
JUMLAH								13.318.101.253				14.379.183.000

Uraian pekerjaan dalam mendukung pencapaian indikator-indikator program dan kegiatan maupun sub kegiatan, diantaranya sebagai berikut :

1. Penyusunan produk hukum terkait pajak daerah.
2. Sosialisasi pajak daerah terhadap wajib pajak (terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Penagihan kepada WP self dan official assesment baik secara langsung/ via surat, maupun bekerjasama dengan instansi vertikal.
4. Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah serta sanksi administratif pajak daerah.
5. Pemeriksaan atau pengawasan terhadap objek pajak daerah bersama dengan instansi vertikal maupun secara langsung.
6. Rekonsiliasi data pendapatan dengan SKPD penghasil dan Bank Persepsi.
7. Koordinasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan pihak terkait.
8. Pelaksanaan ekstensifikasi pajak daerah bersama instansi vertikal maupun secara langsung.
9. Penilaian NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
10. Penyusunan dokumen ketetapan pajak daerah dan Pelaksanaan kegiatan penyerahan SPPT PBB secara simbolis, Cetak massal dan pendistribusian SPPT PBB bagi wajib pajak.
11. Penelitian dan verifikasi data wajib pajak.
12. Penyusunan target pendapatan daerah Kota Cimahi.
13. Penyusunan pelaporan basis data pajak/ Pemuktahiran data PBB.
14. Pemeliharaan dan pengembangan kesisteman pajak daerah
15. Digitalisasi kesisteman pajak daerah.
16. Pembinaan dan Peningkatan kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah bagi pegawai.
17. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

18. Fasilitasi layanan keuangan dan pelaporan keuangan.
19. Fasilitasi layanan umum / penunjang perkantoran.
20. Fasilitasi layanan kepegawaian.
21. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan / gedung kantor.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPPENDA KOTA CIMAHI

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/ kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bappenda Kota Cimahi selama 1 (satu) tahun pada tahun berjalan yang disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya.

Program Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi menjadi salah satu program prioritas RPD Kota Cimahi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bappenda Kota Cimahi. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, yang dijabarkan Bappenda Kota Cimahi kedalam rencana kegiatan berikut sub-sub kegiatannya untuk setiap program yang didasarkan dari penentuan strategi dan arah kebijakan Bappenda Kota Cimahi.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program disertai indikator kinerja dan kebutuhan pendanaannya, yang diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja Bappenda Kota Cimahi. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan menjadi tolak ukur keberhasilan/ kegagalan dari tujuan, sasaran dan program.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Bappenda Kota Cimahi tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, isu-isu strategis yang sedang dihadapi, dan usulan program/ kegiatan dari masyarakat disinergikan dengan tujuan dan sasaran Bappenda Kota Cimahi, maka diperoleh Rencana Kerja dan Pendanaan Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024, sebagaimana disajikan dalam tabel, berikut ini :

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
BAPPENDA KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
04				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	% Peningkatan Target Pajak Daerah		3,00%	3.569.107.115
					% Realisasi Pajak Daerah		100,00 %	
	2	01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah data WP yang ditetapkan menjadi SKPD		115.615 WP	3.569.107.155
			01	SubKeg Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	2 dok	70.999.814
			02	SubKeg Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan daerah	Kota Cimahi	1 dok	148.655.500
			03	SubKeg Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Kota Cimahi	4 lap	190.000.000
			04	SubKeg Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	Kota Cimahi	2 unit	786.594.562
			05	SubKeg Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak, dan wajib pajak daerah	Kota Cimahi	3 lap	523.718.992
			06	SubKeg Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Kota Cimahi	3 lap	61.909.964
			07	SubKeg Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOP nya	Kota Cimahi	50 objek pajak	95.999.678
			08	SubKeg Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Kota Cimahi	118.098 dok	735.460.250

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
			1 0	SubKeg Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Kota Cimahi	118.098 dok	173.949.806
			1 1	SubKeg Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	Kota Cimahi	1.200 dok	265.246.649
			1 2	SubKeg Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	Kota Cimahi	300 dok	106.821.000
			1 3	SubKeg Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	Kota Cimahi	500 dok	246.670.000
			1 4	SubKeg Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	Kota Cimahi	12 dok	88.426.400
			1 5	SubKeg Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah laporan perkembangan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Kota Cimahi	2 lap	74.654.500
0 1				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		73 (BB) Nilai	9.748.994.13 8
					Indeks Profesionalitas ASN		64,10 Nilai	
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		76 Nilai	
	2	0 1		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun		15 dok / lap	124.147.000
			0 1	SubKeg Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Cimahi	2 dok	53.647.000
			0 2	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.950.000
			0 3	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.500.000

Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
		04	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.750.000
		05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kota Cimahi	1 dok	2.450.000
		06	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Cimahi	4 lap	8.850.000
		07	SubKeg Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Cimahi	5 lap	51.000.000
	202	02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan fasilitasi administrasi keuangan perangkat daerah		12 bln	7.927.383.138
		01	SubKeg Penyediaan Gaji & Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kota Cimahi	36 orang	7.879.613.138
		05	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kota Cimahi	1 lap	46.200.000
		07	SubKeg Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kota Cimahi	1 lap	1.570.000

Kode			Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
	2	05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian		2 keg	69.457.000
			10 SubKeg Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	70 orang	19.333.000
			11 SubKeg Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kota Cimahi	8 orang	50.124.000
	2	06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah		12 bln	341.832.900
			01 SubKeg Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	1 paket	1.532.000
			02 SubKeg Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	73.466.900
			03 SubKeg Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kota Cimahi	3 paket	8.091.000
			04 SubKeg Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	82.644.800
			05 SubKeg Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kota Cimahi	2 paket	58.862.200
			08 SubKeg Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kota Cimahi	5 lap	3.700.000
			09 SubKeg Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kota Cimahi	70 lap	113.536.000
	2	07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan fasilitasi gedung/ kantor yang diadakan		12 bln	111.575.000
			06 SubKeg Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	17 unit	816.507.100

Kode				Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu indikatif (Rp.)
			09	SubKeg Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kota Cimahi	1 unit	71.875.000
	2	08		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		12 bln	119.875.000
			01	SubKeg Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kota Cimahi	4 lap	90.515.000
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kota Cimahi	12 lap	29.360.000
	2	09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan barang milik daerah yang dipelihara		12 bln	277.917.000
			02	SubKeg Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kota Cimahi	10 kend	200.270.000
			06	SubKeg Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Cimahi	68 alat	77.647.000
JUMLAH								13.318.101.253

Proyeksi target penerimaan Pendapatan Daerah Kota Cimahi untuk Tahun 2024, sebagai berikut :

TABEL 4.2
PROYEKSI PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2024

No	Uraian Pendapatan	Target Penerimaan (Rp.)
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	374.372.503.828,00
A.	Pajak Daerah	179.004.219.650,00
1	PBJT Jasa Perhotelan	225.703.216,00
2	PBJT Makanan/Minuman	23.275.000.000,00
3	PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan	75.000.000,00
4	Pajak Reklame	2.371.741.403,00
5	PBJT Tenaga Listrik	39.419.518.704,00
6	PBJT Jasa Parkir	480.250.000,00
7	Pajak Air Tanah	19.077.006.327,00
8	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	37.830.000.000,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.	56.250.000.000,00
B.	Retribusi Daerah	11.555.400.285,00
B.1	Retribusi Jasa Umum	4.194.825.285,00
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.300.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	850.000.000,00
3	Retribusi Pelayanan Pasar	1.044.825.285,00
B.2	Retribusi Jasa Usaha	4.782.575.000,00
1	Retribusi RUSUNAWA	3.196.680.000,00
2	Penggunaan Peralatan, ruangan dan/atau laboratorium di Puskesmas untuk pelayanan kesehatan hewan	275.650.000,00
3	Laboratorium Lingkungan	560.245.000
4	Baros Information Technology Creative Center	700.000.000,00
5	Balai Benih Ikan	50.000.000,00
B.3	Retribusi Perizinan Tertentu	2.578.000.000,00
1	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	2.000.000.000,00
2	Retribusi perpanjangan IMTA	578.000.000,00
C.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	9.391.200.000,00
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	9.391.200.000,00
D.	Lain-lain Pendptan Asli Daerah yang Sah	174.421.683.893,00
II.	PENDAPATAN TRANSFER	682.797.102.796,00
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	538.011.133.000,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	144.785.969.796,00
JUMLAH TOTAL PENDAPATAN DAERAH		1.057.169.606.624,00

Sumber : Bidang identifikasi Kota Cimahi (data tanggal 4 Juli 2023)

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan muatan kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun anggaran digunakan juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Bappenda Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024, selain itu dapat digunakan untuk me-review hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Renja PD Tahun 2024, ini nantinya akan menjadi tolok ukur dalam pertanggungjawaban kinerja Bappenda Kota Cimahi yang diimplementasikan melalui akuntabilitas penyelenggaraan tugas yang mengandung pengertian bahwa setiap program dan kegiatan serta hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Renja PD Bappenda Kota Cimahi Tahun 2024 disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, analisis kebutuhan, dan usulan dari para pemangku kepentingan. Renja PD Tahun 2024 sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yaitu urusan keuangan, yang terdiri dari 2 (dua) program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota, dan program pengelolaan pendapatan daerah yang mempunyai 8 (delapan) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan dengan kebutuhan dana/ pagu indikatif sebesar Rp. 13.318.101.253,- (*tiga belas milyar tiga ratus delapan belas juta seratus satu ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah*), terdiri dari :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah sebesar Rp. 3.569.107.115,- (*tiga milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh ribu seratus lima belas rupiah*), sebagai pencapaian sasaran strategis Bappenda Kota Cimahi yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) di bidang urusan keuangan.
2. Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp. 9.748.994.138,- (*sembilan milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu seratus tiga puluh delapan rupiah*), adalah untuk mendukung pelaksanaan fungsi perencanaan, penganggaran, evaluasi, pelaporan, keuangan,

dan kepegawaian serta fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Catatan penting yang menjadi perhatian Bappenda Kota Cimahi dan menjadi rencana tindak lanjut pada tahun berikutnya, pelaksanaan kegiatannya masih keberlanjutan, yaitu :

1. Penyusunan produk hukum terkait pajak daerah.
2. Sosialisasi pajak daerah (Terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).
3. Penagihan kepada WP self dan official assesment baik secara langsung/ via surat, maupun bekerjasama dengan instansi vertikal.
4. Penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan pajak daerah serta sanksi administratif pajak daerah.
5. Pemeriksaan atau pengawasan terhadap objek pajak daerah bersama dengan instansi vertikal maupun secara langsung.
6. Rekonsiliasi data pendapatan dengan SKPD penghasil dan Bank Persepsi.
7. Koordinasi pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah dengan pihak terkait.
8. Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah (Pendataan dan pengawasan bersama instansi vertikal).
9. Penyusunan dokumen ketetapan pajak daerah dan Pelaksanaan kegiatan penyerahan SPPT PBB secara simbolis, Cetak massal dan pendistribusian SPPT.
10. Penyusunan target pendapatan daerah.
11. Penyusunan pelaporan basis data pajak/ Pemuktahiran data PBB.
12. Pemeliharaan dan pengembangan kesisteman pajak daerah
13. Digitalisasi kesisteman pajak daerah.
14. Pembinaan dan Peningkatan kompetensi keahlian terkait pajak khususnya pajak daerah.
15. Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi.

16. Fasilitasi layanan keuangan dan pelaporan keuangan.
17. Fasilitasi layanan umum / penunjang perkantoran.
18. Fasilitasi layanan kepegawaian.
19. Pengadaan dan pemeliharaan peralatan / gedung kantor.

Demikian Renja PD ini dibuat sebagai gambaran kebutuhan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2024, diharapkan bahwa perencanaan telah dilaksanakan secara terintegrasi, sinergis dan sejalan dengan tugas dan fungsi untuk mendukung capaian prioritas nasional atau prioritas daerah. Disadari bahwa dalam penyusunan Renja PD ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memungkinkan dilakukannya perbaikan, sebagaimana dokumen pembangunan lainnya.

Cimahi, Juli 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA
PENGADATAN DAERAH,



MOCHAMAD RONNY

Perwakilan Utama Muda
NIP. 19691015 199003 1 011